



# Etika Islam dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Kuliah Yudisium  
Program Pasca Sarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
28 Juli 2017

Wahyudi Kumorotomo, PhD  
[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)



# Topik Bahasan

1. Proporsi Lulusan S2 di Indonesia
2. Makin tinggi pengetahuan & keterampilan, makin besar tanggungjawab
3. Etika Islam dan akuntabilitas pelayanan publik
4. Peran lulusan S2 dalam peningkatan kualitas pelayanan publik: pendidikan & kesehatan.



## Lulusan S2 adalah kelompok istimewa...

- Th 2017, rasio S2 per 1 juta penduduk: 2.300 (0,23%)  
→ target Kemristekdikti: 16.000 per 1 jt penduduk (2025)
- Jenjang pendidikan S2 adalah *middle-manager* pada organisasi (publik maupun swasta).
- Yang dituntut bukan hanya “kerja keras”, tetapi “kerja cerdas” → Gagasan pembaruan, efisiensi, produktivitas.



# Makin besar tanggungjawab moral...

- Allah meninggikan derajat orang yg berilmu.

Al Mujadilah: 11

- Hindari sikap sombong, takabur, arogan.

Al Furqan: 63; Al A'raaf: 13; Luqman: 18

- “With a greater power, lies a greater responsibility.”

# Jenis-jenis Pelayanan Publik



## Pelayanan Sosial Dasar

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pelayanan sosial

## Pelayanan Administrasi

- Perijinan
- Lisensi
- Akta



# Apakah yg disebut Pelayanan Publik?

- Pasal 1 UU No.25/2009: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan perundang-undangan.
- Bentuk pelayanan publik: penyediaan barang/jasa, pelayanan administratif.



# KONDISI UMUM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

1. Pemberian pelayanan yang diskriminatif
2. Transparansi pelayanan sangat rendah, terutama masalah biaya: ada uang rokok, uang administrasi, uang sukarela, uang terima kasih, salam tempel – soal penggunaan bahasa
3. Birokrat belum *responsive*, keluhan tidak ditanggapi
4. Tidak ada jaminan kepastian: dalam aspek biaya, waktu, persyaratan, informasi
5. Masih adanya sikap arogansi penyedia layanan, merasa dibutuhkan
6. Berperan sebagai penguasa dan bukan pelayan
7. Pengguna layanan sebagai obyek dan bukan subyek dll.

# Masalah Etika & Akuntabilitas Pelayanan Publik



1. Pentingnya mencontoh sifat Rasul dlm pelayanan: **siddiq, amanah, tabligh, fathonah.**

An Nahl: 125

2. Larangan menyuap, memperjual-belikan jabatan.

Al Baqarah: 188

3. Imparsialitas, sikap adil dalam pelayanan publik.

An Nisaa: 58.

4. Lakukan pelayanan dengan keberpihakan: kepada fakir dan miskin.

Al Baqarah: 273





Kualitas layanan publik yang baik  
berasal dari  
kebijakan sosial yang baik...



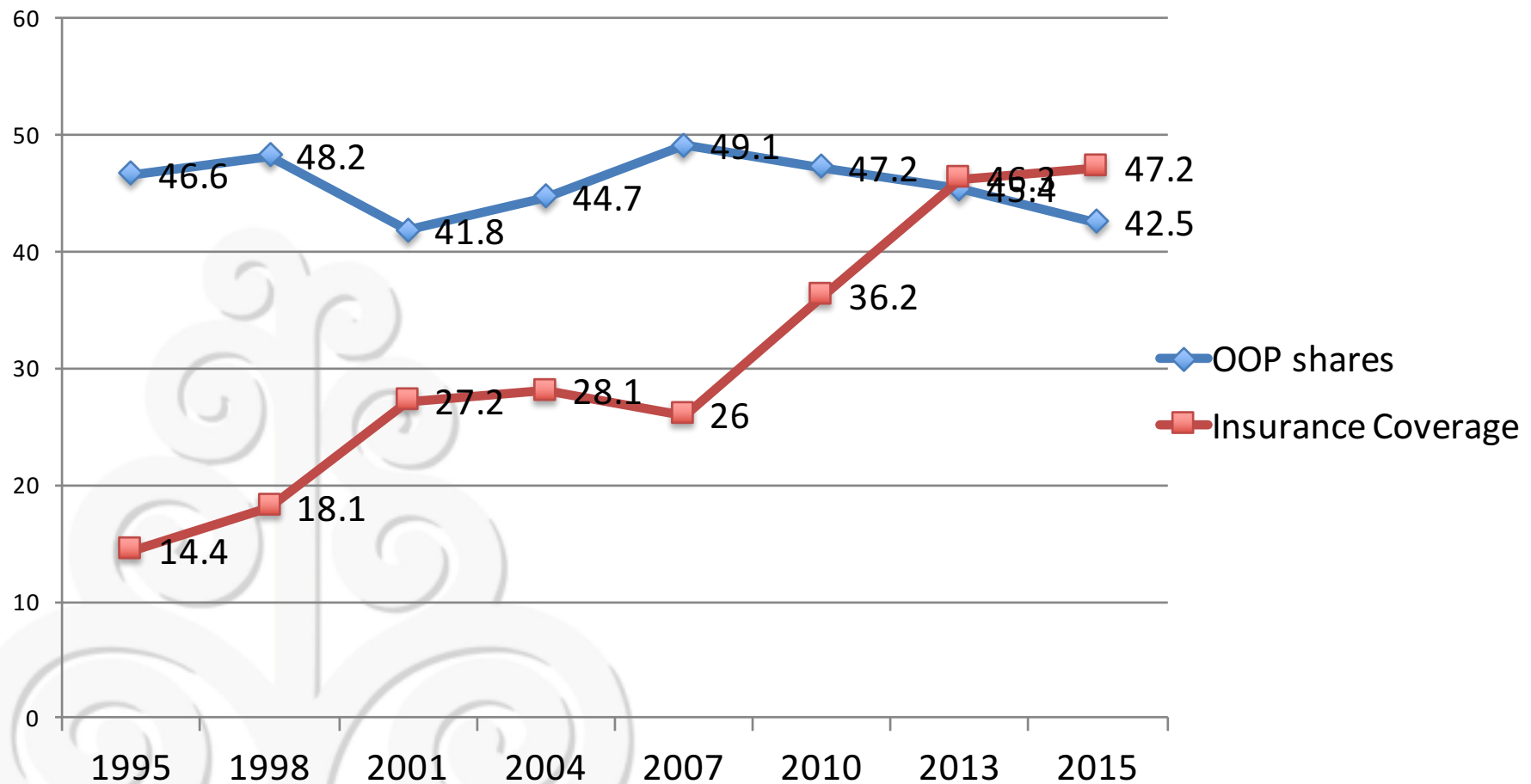
“Governments have choices about how to best allocate their resources within the health sector — between different types of health services, between different modes of financing and delivery, and between different levels of care — all of which have implications for improving the health of the poor

(Shah, 2005)

Locally Rooted, Globally Respected

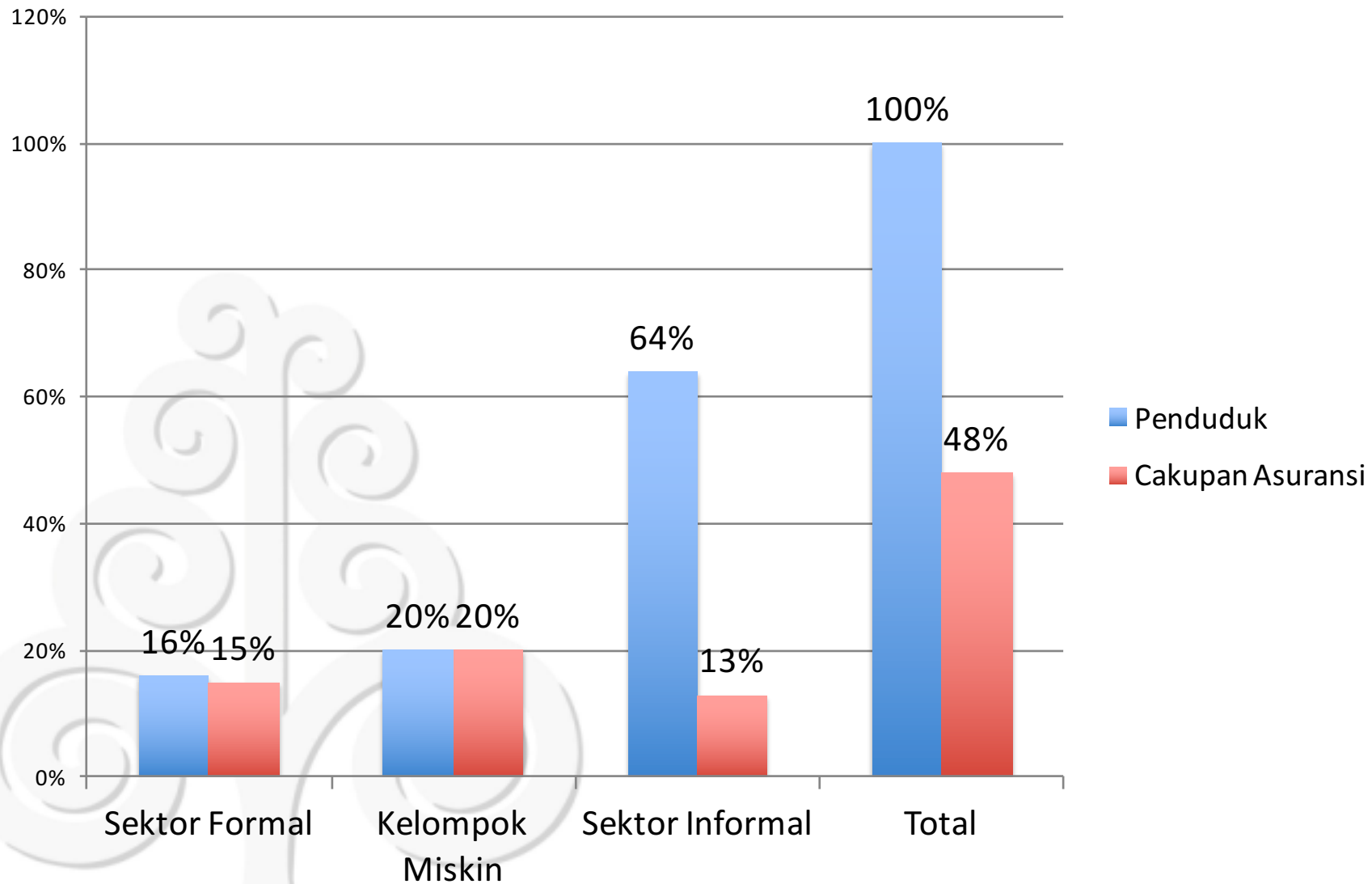


## Keberpihakan layanan kepada fakir-miskin..



Source: WHO, Susenas, 2014. The 2015 figure is an estimate.

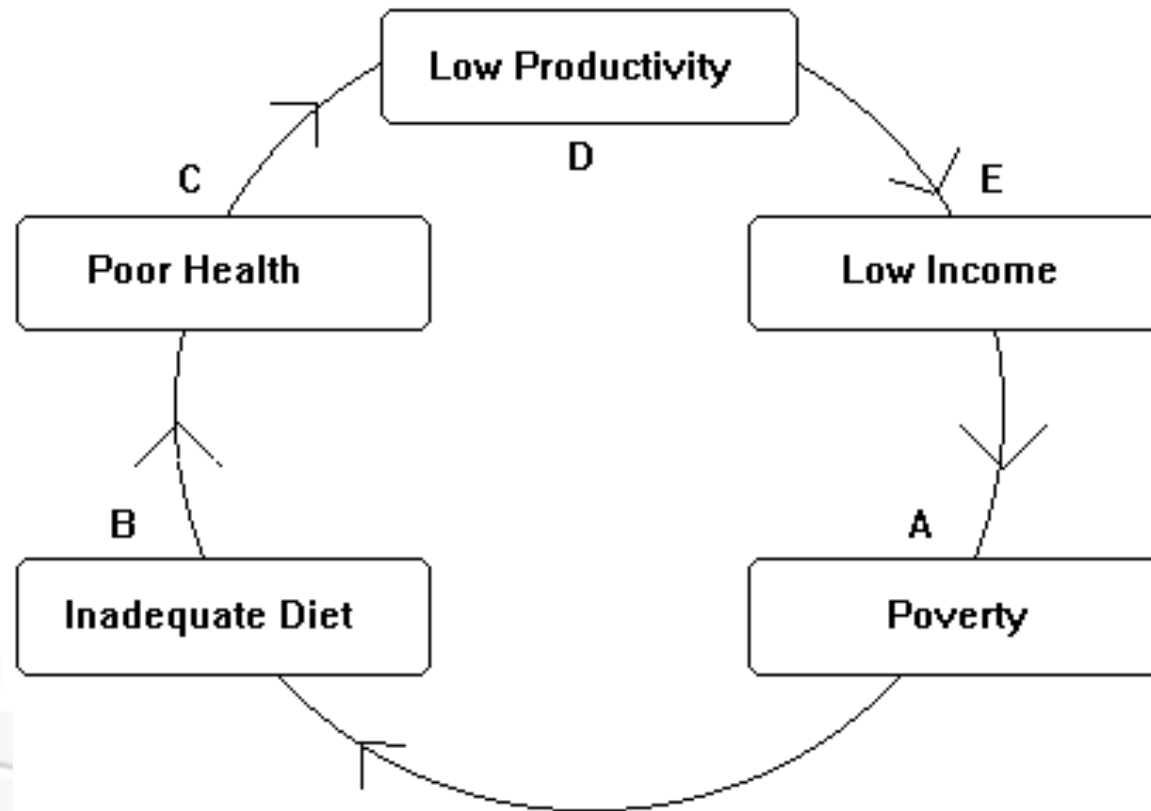
# Tantangan Kebijakan: Sektor Informal



Sumber: Thangcharoensathien, 2011



# Pendidikan akan memutus lingkaran kemiskinan...



**Figure 1:** *The vicious circle of poverty - Individual level.*  
(source; Barke & O'Hare, 1991, page 43.)



# Keberpihakan Layanan Pendidikan

- BOS: Mengapa kembali kepada infrastruktur sekolah, bukan untuk beasiswa dan pencegahan anak putus-sekolah?
- Inefisiensi dana pendidikan. Apakah proporsi 20% anggaran untuk pendidikan sudah efektif meningkatkan kualitas SDM?
- Perguruan tinggi, mengapa pendidikan diperlakukan sebagai industri komersial? Bidik-misi: Apakah pendidikan masih berpihak pada fakir-miskin?



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**THANK YOU**

